



JURNALISME INDONESIA
DI ERA LIBERALISME DAN DIGITALISASI:
Tantangan dalam Demokratisasi Media

Editor

Anang Hermawan

PENERBIT
KOMUNIKASI **OII**

Jurnalisme Indonesia di Era
Liberalisme dan Digitalisasi:
Tantangan dalam Demokratisasi Media

Editor: Anang Hermawan

PENERBIT
KOMUNIKASI **OII**

Jurnalisme Indonesia di Era Liberalisme dan Digitalisasi:
Tantangan dalam Demokratisasi Media

1. Jurnalistik 2. Komunikasi 3. Media

Penulis:

*Fajar Junaedi, Z. Hidayat, Zainuddin Muda Z. Monggilo, Herlina Kusumaningrum,
Iwan Awaluddin Yusuf, Herlina Agustin, Ido Prijana Hadi, Dwi Pela Agustina,
Triyono Lukmantoro, Nisa Alfira, Sri Handayani, Tommy Satriadi Nur Arifin Erawan,
Valentina Sri Wijiyati, Mukhijab*

Editor: Anang Hermawan

Lukisan sampul: Ali Minanto

Tata Letak : Zarkoni

Hak cipta tulisan pada masing-masing penulis

Diterbitkan oleh:

**PENERBIT UIN
KOMUNIKASI**

Jalan Kaliurang Km 14,5, Besi, Sleman 55584

Daerah Istimewa Yogyakarta, Telepon: (0274) 898444 ext 3267

E-mail: komunikasi@uii.ac.id

Cetakan Pertama, Februari 2018

x + 348; 17 x 23 cm

ISBN: 978-602-98263-8-8

Kata Pengantar

Dalam kurun satu dasawarsa terakhir, jurnalisme di
dihadapkan pada dua kenyataan penting: arus liberalisme
menguat dan digitalisasi media informasi. Keduanya
implikasi pada raut jurnalisme yang berkembang saat
kebebasan dan keterbukaan yang bergulir sejak reformasi
membawa pergeseran dari sistem otoritarian ke
Pergeseran ini tidak hanya memberikan ruang kebebasan
longgar bagi media, tapi juga membawa risiko kooptasi
kekuatan-kekuatan pemodal yang berkepentingan
Konglomerasi dan oligarkhi media yang saat ini muncul
ancaman baru dan tidak menutup kemungkinan akan
bentuk otoritarianisme dalam wajah yang lain. Pemilu 2013
contoh konkret bagaimana media menjadi kuda tunggangan
pemodal -yang sekaligus- politisi dalam kontestasi politik
kepentingan politik dan korporasi media menyeret me-
pusaran politik praktis yang mengesampingkan ideal
independensi. Media menjadi corong untuk me-
kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Kecenderungan
menjadi kontraproduktif bagi bangunan demokrasi yang
ditegakkan.

Sementara itu, digitalisasi informasi membawa per-
baru dalam praktik jurnalisme di Indonesia. Kehadiran
platform media yang distimulasi oleh kemajuan teknologi
(media baru) meniscayakan bentuk-bentuk baru jurnalisme
jaringan computer global, memicu hadirnya e-news (berita

yang memungkinkan berita dipublikasikan dengan format *Hypertext Markup Language* (HTML). Ada beberapa kata kunci yang melekat dalam media baru ini, seperti *digitality, interactivity, hypertextuality, dispersal, dan virtuality* (Lister, 2003: 13), yang mengisyaratkan arus informasi yang tidak lagi linier dan searah. Jurnalisme berbasis online di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak 1995, yang disebut sebagai *online journalism* gelombang pertama (1995-1997). Gelombang ini ditandai oleh *Internet Service provider* (ISP), *mailing list* -yang cukup sensasional karena sangat berpesan dalam penggulingan Soeharto-, *Tempo Interaktif*, dan *Kompas Cyber Media*. Kemudian disusul dengan *online journalism* gelombang kedua (1998-2001) yang ditandai dengan kehadiran situs-situs dotcom. *Online journalism* gelombang ketiga yang dimulai sejak 2002 sering disebut sebagai era jurnalisme multimedia (*webcasting*) dengan pelbagai produk layanan seperti *news feed, podcast, mobile phone news*, dan sebagainya. Produk berita lebih cepat, transparan, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga publik terlibat secara aktif dalam sirkulasi informasi (*netizen*).

Munculnya forum jejaring sosial (media sosial) dengan pelbagai aplikasinya, semakin mengokohkan potensi online journalism, sekaligus menguatkan keberadaan publik sebagai *netizen* dan *digital native* yang secara aktif ikut memproduksi informasi. Informasi diproduksi secara divergen dan berasal dari pelbagai arah dengan beragam isu yang melibatkan publik secara massif. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memaksa produsen berita sanggup beradaptasi dan membuat preferensi media secara multiplatform (*convergence*). Jurnalisme generasi modern, bahkan sebagian kalangan menyebutnya *post-modern*, diarahkan menjadi media yang sanggup memberikan kejutan (*scoop*), yang

mensyaratkan kecepatan sebagai unsur utama. Kegiatan jurnalistik yang berorientasi untuk menyampaikan informasi baru (*news*) menjadi lebih canggih dengan pemanfaatan multimedia. Multimedia yang menggabungkan teks, audio, dan video, meninggalkan karakter media konvensional sekaligus menyuguhkan fenomena baru jurnalisme yang mendorong partisipasi publik secara intens (*public engagement*).

Berefleksi dari fenomena tersebut, ada beberapa implikasi yang lahir lantaran pergeseran ini. *Pertama*, terkait dengan **kebijakan dan regulasi media**. Perlu ada peraturan yang cukup kuat dan ketat bagi media sehingga praktik jurnalisme tidak menyimpang dari koridor regulasi media. Peraturan perundangan yang ada perlu ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan konteks dan dinamika sejarah yang sedang berkembang. Penegakkan peraturan juga penting dilakukan berkaitan dengan pola kepemilikan media yang selama ini ada. Monopoli dan konsentrasi kepemilikan media oleh segelintir kelompok menyebabkan media tersandera oleh kepentingan pemilik media. Konsentrasi kepemilikan media menciderai semangat demokratisasi media yang mengedepankan keanekaragaman dalam pelbagai aspek: kepemilikan, isi dan suara/pendapat (*diversity of ownership, content and voices*). Konsentrasi dan monopoli kepemilikan media hanya menciptakan jurnalisme yang bias dan tendensius serta mengabaikan kepentingan publik.

Kedua, **Idealisme dan kebebasan pers**. Idealisme dan kebebasan pers adalah prinsip utama jurnalisme dalam demokratisasi media. Kebebasan berbicara dan berekspresi (*freedom of speech and freedom expression*) menjadi jaminan dalam negara demokrasi. Po

kepemilikan media dan kooptasi yang dilakukan segelintir elit menjadi ancaman bagi kebebasan pers. Kepentingan ekonomi politik yang memasung media menjadi represor yang membungkam suara-suara kritis. Media didikte untuk tunduk pada kepentingan-kepentingan yang sedang merancang otoritarianisme baru. Upaya untuk mendorong independensi media mutlak diperlukan agar media dapat kembali pada khittahnya untuk menyuarakan informasi yang benar (*well informed*).

Ketiga, pentingnya **regulator media yang independen**. Keberadaan lembaga ini dibutuhkan sebagai wasit dan hakim atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan media terhadap regulasi. Regulator yang independen memiliki kekuatan saat berhadapan dengan kelompok-kelompok kepentingan yang berdiri di belakang media. Kita dapat berkaca pada keberadaan regulator media di beberapa negara, seperti Federal Communications Commission (FCC) di Amerika Serikat, Office of Communication (Ofcom) di United Kingdom, dan beberapa regulator di negara-negara Afrika dan Asia (Thailand) yang menunjukkan independensi yang kuat. Belajar dari komparasi ini, Indonesia harus mulai membenahi dan merevitalisasi lembaga regulator seperti KPI agar mampu merepresentasikan kekuatan publik.

Keempat, **digitalisasi media** sebagai kekuatan jurnalisme kontemporer. Tumbuhnya jurnalisme online dan digitalisasi penyiaran memberi harapan baru bagi tegaknya demokratisasi media. Digitalisasi media dapat memecah konsentrasi dan oligopoli dalam penyiaran yang selama ini terjadi. Perkembangan media baru ini menjanjikan bentuk-bentuk jurnalisme yang dapat melibatkan publik

secara aktif. Dengan demikian, harapan media menjadi ruang yang mempertemukan gagasan publik, dan mengartikulasikan suara publik, dapat segera terwujud.

Kajian tentang kebijakan dan regulasi terkait konsentrasi kepemilikan media, idealisme dan kebebasan independensi dalam jurnalisme, dan orientasi media jurnalis kontemporer menarik untuk dilakukan. Perspektif *multistakeholders* yang memiliki otoritas atas jurnalisme signifikan bagi pembenahan jurnalisme Indonesia ke depan dapat terlibat dalam arus kebebasan dan digitalisasi informasi kehilangan idealisme dan independensi. Jurnalisme yang independen akan memberikan garansi bagi kokohnya bangunan demokrasi. Jurnalisme kontemporer tidak hanya sekedar memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan merayakan kebebasan membawa misi untuk mendorong publik menjadi *democratic citizen* memiliki kemampuan dan kesadaran untuk bersuara dalam demokrasi.

Yogyakarta, Februari 2018

Anang Hermawan || Editor

DAFTAR ISI

Pengantar Editor

Daftar Isi

Mencari Berita Sepak Bola : Pola Distribusi Koran yang Berisi Berita Sepak Bola di Tingkat Pengecer dan Perilaku Pembacanya di Kota Sragen <i>Fajar Junaedi</i>	1
Konsumsi Media Sepanjang Hidup Khalayak: Kebiasaan Penggunaan Media Sosial Lintagenerasi <i>Z. Hidayat</i>	17
Bertemunya Dimensi Teoretis dan Praktis di era konvergensi media <i>Zainuddin Muda Z. Monggilo</i>	73
Otonomi Jurnalisme Profesional <i>Herlina Kusumaningrum</i>	105
Absennya Sensitivitas Gender dalam Jurnalisme Kita: Kasus Koran Kuning <i>Iwan Awaluddin Yusuf</i>	125
Reorientasi Pendidikan Jurnalisme di Indonesia Studi multi kasus tentang tantangan industri Media massa di daerah <i>Herlina Agustin</i>	149

Implikasi Penyiaran Interaktif Terhadap Pengelolaan Produksi Konten

Ido Prijana Hadi

Jurnalisme Investigasi, Solusi untuk Berita Konflik

Dwi Pela Agustina

Jurnalisme, "Pesta Bikini", Dan Kepanikan Moral

Triyono Lukmantoro

"Jurnalisme Teror":

Paradoks Regulasi Media *Online* di Indonesia

Nisa Alfira & Sri Handayani

Makna Objektivitas dalam Menyiarkan

Berita tentang Konflik

Tommy Satriadi Nur Arifin Erawan

Jurnalisme, Televisi, dan Hak Asasi Tuli atas

Informasi: Kajian Kebijakan Jurnalisme dan

Pertelevisian Indonesia

Valentina Sri Wijiyati

Industrialisasi Koran dan Problem Pekerja Media

Mukhijab